



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 35/DJU/HK2/I/2025
Sifat : Penting
Hal : Penomoran Perkara Pidana dan Perdata

Jakarta, 9 Januari 2025

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi
Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Memperhatikan penerapan format penomoran perkara yang tidak seragam pada Seluruh Pengadilan Negeri terkait perkara eksekusi, perkara permohonan harta kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lainnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 dan perkara penyelesaian keberatan pihak ketiga yang beritikad baik terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 dengan ini kami sampaikan hal-hal yang harus dipedomani sebagai berikut:

1. Untuk penomoran pada perkara perdata dilakukan dengan format sebagai berikut:

a. Permohonan Sita Eksekusi

Format penomoran;

Nomor/Pdt.P.Sita.Eks/Tahun/PN

b. Permohonan Sita

Format penomoran;

Nomor/Pdt.P.Sita/Tahun/PN ...

c. Permohonan Sita Fidusia

Format penomoran;

Nomor/Pdt.P.Sita.Fidusia/Tahun/PN

d. Permohonan Konstatering

Format penomoran;

Nomor/Pdt.Eks/Konst/Tahun/PN

e. Permohonan Konsinyasi

Format penomoran;

Nomor/Pdt.P-Kons/Tahun/PN ...

f. Perkara Perdata Lingkungan Hidup

Format penomoran;

Nomor/Pdt.Sus-LH/Tahun/PN ...



2. Untuk penomoran pada perkara pidana dilakukan dengan format sebagai berikut:

a. Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana

Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan

Format penomoran permohonan;

- Nomor/Pid.PHK/Tahun/PN ...

Format penomoran permohonan keberatan yang diajukan saat pengumuman dan saat persidangan;

- Nomor(sama dengan nomor permohonan penanganan harta kekayaan yang diajukan keberatan)/Keberatan-Pid.PHK/Tahun/PN ...

Contoh:

Nomor permohonan pengajuan penanganan harta kekayaan
10/Pid.PHK/2024/PN Abc

Nomor Permohonan keberatan terhadap permohonan pengajuan
penanganan harta kekayaan
10/Keberatan-Pid.PHK/2024/PN Abc

Format penomoran permohonan keberatan yang diajukan setelah ada putusan;

- Nomor/Keberatan-Pid.PHK/Tahun/PN ... Jo Nomor/Pid.PHK/Tahun/PN ...

b. Keberatan Pihak Ketiga Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Format penomoran;

Nomor/Keberatan-Pid.Sus.TPK/Tahun/PN ... Jo Nomor/Pid.Sus-TPK/Tahun/PN ...

c. Penetapan Izin dan Persetujuan Penggeledahan

Format penomoran;

Nomor/Pid.B.Geledah/Tahun/PN ...

d. Penetapan Izin dan Persetujuan Penyitaan

Format penomoran;

Nomor/Pid.B.Sita/Tahun/PN ...

e. Penetapan Pinjam Pakai Barang Bukti

Format penomoran;

- Nomor/Pid.B.BB/Tahun/PN ...
- Nomor/Pid.Sus.BB/Tahun/PN ...

f. Penetapan Izin Besuk

Format penomoran;

- Nomor/Pid.Besuk/Tahun/PN ...
- Nomor/Pid.Sus.Besuk/Tahun/PN ...

g. Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

Format penomoran;



Nomor/Res.Pid/Tahun/PN Jo Nomor Pokok Perkara Pidanannya

h. Perkara Praperadilan Lingkungan Hidup

Format penomoran;

Nomor/Pra.Pid.Sus-LH/Tahun/PN ...

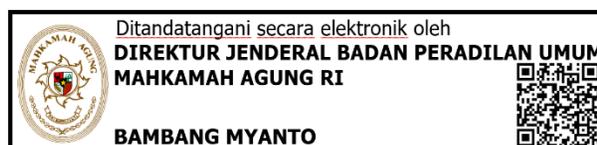
i. Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Format penomoran;

Nomor/Pid.Sus-LH/Tahun/PN ...

3. Untuk semua jenis perkara perlawanan baik perlawanan para pihak (*partij verzet*) maupun perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) menggunakan kode Pdt.Bth. Sementara perlawanan terhadap Putusan verstek menggunakan kode Pdt.Plw.
4. Nomor urut register pertahun dimulai dari angka 1 dan seterusnya (menggunakan angka arab).

Demikian untuk diperhatikan dan dipedomani.



Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

